

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan atas Implementasi SPAN terhadap proses pencairan dana APBN pada KPPN Jakarta I sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi SPAN sangat membantu dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Semua informasi yang ada dalam SPAN sudah saling terintegrasi antar modul dan tersaji secara akurat *by system* sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja KPPN Jakarta I. Implementasi SPAN di KPPN Jakarta I saat ini sudah berjalan aman dan lancar. Setelah diimplementasikan selama 8 (delapan) tahun, tidak ditemui kendala yang berarti dalam pengimplementasian SPAN di KPPN Jakarta I baik dari segi sistem maupun SDM yang mengoperasikan. Untuk sistem, jaringan, dan SDM pendukung yang ada saat ini, sudah lebih baik daripada sebelumnya.
2. Implementasi SPAN di KPPN Jakarta I sudah cukup efektif dalam membantu proses penerbitan SP2D, retur SP2D dan realisasi penyerapan anggaran satker. SPAN telah secara nyata mampu mengakomodasi beban kerja KPPN Jakarta I

dalam menyelesaikan proses pencairan dana yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dana dapat disalurkan secara tepat waktu, jumlah, dan penerima. Efektivitas penggunaan SPAN dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

- Penerbitan SP2D

Secara umum, selama 2019-2021, penerbitan SP2D masih cenderung sedikit pada Triwulan I dan terkonsentrasi pada Triwulan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terjadi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran di KPPN Jakarta I. Meskipun penerbitan SP2D masih terkonsentrasi di akhir tahun anggaran, jumlah SP2D yang diterbitkan pada bulan Desember terus mengalami penurunan *year-on-year*. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya perbaikan tata kelola pencairan dana APBN di KPPN Jakarta untuk mengurangi terjadinya penumpukan pencairan dana di akhir tahun.

- Retur SP2D

Sebagai KPPN Tipe A1 yang membina 302 satker, probabilitas untuk menemui satker yang mengalami retur SP2D di KPPN Jakarta I sangatlah besar. Salah satu penyebab terjadinya retur tersebut adalah karena *human error*, yaitu kesalahan dalam penginputan informasi yang ada dalam SP2D. KPPN Jakarta I terus mengupayakan perbaikan tata kelola retur SP2D, salah satunya adalah dengan memberikan Surat Himbuan kepada seluruh satker mitra kerja. Selain itu KPPN Jakarta I juga berusaha meningkatkan kualitas

SDM KPPN Jakarta I yang lebih terampil dan berhati-hati dalam proses pengecekan SPM.

- Realisasi Penyerapan Anggaran

Selama 2019-2021, banyak satker KPPN Jakarta I yang tidak mencapai target penyerapan anggaran pada Triwulan I hingga Triwulan III. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penumpukan penyerapan anggaran di Triwulan IV. Pada bulan-bulan tertentu terdapat juga satker yang tidak mencatatkan realisasi belanja sama sekali. Apabila hanya dilihat dari data, fenomena tersebut mengindikasikan buruknya manajemen satker yang menyebabkan perencanaan dan eksekusi pelaksanaan anggaran tidak berjalan dengan baik. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut, terselip fakta yang menarik mengenai satker di KPPN Jakarta I yang antara lain berasal dari satker perwakilan di bawah Kementerian Luar Negeri yang mana satker-satker tersebut memiliki aturan tersendiri terkait dengan pelaksanaan APBN yang berbeda dengan satker di dalam negeri.

3. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPAN seperti dari sisi informasi, isi kebijakan, dukungan, dan pembagian potensi, secara keseluruhan faktor-faktor tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan SPAN pada KPPN Jakarta I dalam hal pencairan dana. Namun, setelah ditinjau lebih lanjut, masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat implementasi SPAN antara lain seperti adanya keterbatasan kemampuan kinerja pegawai yang sudah berusia tua serta belum

terintegrasinya sistem SPAN dengan sistem perbankan sehingga berakibat pada terhambatnya kinerja pelayanan KPPN.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis terkait dengan tinjauan atas implementasi SPAN terhadap proses pencairan dana APBN, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Proses pengintegrasian SPAN dengan sistem perbankan kiranya dapat ditinjau lebih jauh karena apabila hal tersebut dapat terealisasi, maka akan menambah efektivitas dalam proses pencairan dana APBN, terutamanya dalam proses penyelesaian retur SP2D. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber daya yang tidak sedikit baik dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, selagi menunggu adanya perbaikan tata kelola sistem menjadi lebih baik oleh DJPB, maka untuk saat ini lebih baik KPPN Jakarta I lebih berfokus kepada peningkatan kualitas SDM.
2. Faktor SDM berperan penting dalam menjaga kelancaran proses kinerja. SDM yang dimiliki oleh KPPN harus lebih *aware* dalam meneliti kelengkapan dan keabsahan dari SPM sebagai dasar penerbitan SP2D supaya proses pencairan dana dapat berjalan lebih baik serta tingkat retur SP2D dapat diperkecil. Faktor SDM juga berperan dalam membina satker, SDM KPPN Jakarta I diharap lebih mampu untuk membina satker agar dapat mencapai target-target pelaksanaan anggaran sesuai apa yang di atur dalam perundangan-undangan.